

## BIBLIOGRAPHY

### Book:

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 253-254
- Ali Imron & Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Pamulang: Unpam Press, 2019), hal 36
- Desi Natalia Salim, Ruslan Menggong, & Baso Madiung, *Kedokteran Forensik Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almada, 1999), hal. 18
- Hans Kelsen, *Hukum dan Logika*, Edisi Terjemahan, (Bandung: PT Alumni, 1973) hal.60
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (United States of America: West Publishing, 1968), hal. 20
- Jusuf, B.S, Aborsi, (Surabaya: Bukit Zaitun, 1998), hal 7
- Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 122
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993) hal 122
- Purwa Dharmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal 825
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 25
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* , (Jakarta: Sinar Grafika , 2003), hlm 307.
- Mukhti Fajar & Yulianto Ahmad, *Dualisme Pengertian Hukum Empiris & Normatif* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 280
- Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi*, (Jakarta: Gramedia, 2016), hal 32

### Article:

- Aisyah Llewellyn, "Compounding Trauma: Indonesia's Abortion Law" <https://thediplomat.com/2018/08/compounding-trauma-indonesias-abortion-law/>, diakses pada 8 Oktober 2021
- Andi Saputra, "Vonis Mati 5 Pemerksosa, PN Bangkalan: Hukuman Mati Tidak Langgar HAM" <https://news.detik.com/berita/d-4733392/vonis-mati-5-pemerksosa-pn-bangkalan-hukuman-mati-tidak-langgar-ham>, diakses pada 8 Oktober 2021

- Diskominfo Prov. Jawa Timur, “Prinsip Keadilan Sosial Solusi Hadapi Neoliberal”. <http://jatimprov.go.id/read/berita-pengumuman/prinsip-keadilan-sosial-solusi-hadapi-neoliberal>, diakses pada 8 Oktober 2021
- Fitri, “Alat Bukti Keterangan Ahli” <https://lldikti12.ristekdikti.go.id/2016/04/25/alat-bukti-keterangan-ahli.html>, diakses pada 8 September 2021.
- Helmi Supriyanto, “Keadilan Sosial Solusi Hadapi Neoliberal” <https://www.harianbhirawa.co.id/keadilan-sosial-jadi-solusi-hadapi-neoliberal/>, diakses pada 8 Oktober 2021
- H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hal. 104
- Josner Simanjuntak, “Policy and Corruption”, *Papua Law Journal*, Vol .2, No.2, August 2018, hal. 127
- Alexandro Salomon, “Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Pada Kasus Perkosaan Dalam Penjatuhan Putusan Pengadulan”. Skripsi, Jakarta: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2010, hal.5
- Jerol Lintogareng, “Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan”, *Lex Crimen*, Vol .2, No.3, Juli 2013, hal. 24
- NN, “Alat Bukti Pengakuan Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia”. <https://fjp-law.com/id/alat-bukti-pengakuan-dalam-hukum-acara-perdata-indonesia/>, diakses pada 8 September 2021.
- Putro Agus Harnowo, “2.5 Juta Janin Tiap Tahun “Menjerit: Karena Dimatikan”. <https://health.detik.com/ulasan-khas/d-1928031/25-juta-janin-tiap-tahun-menjerit-karena-dimatikan/>, diakses pada 8 September 2021.

**Journal:**

- Baiq Anisya Yolanda, “Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Sikap Terhadap Aborsi Pada Wanita Usia Subur di Wilayah Kerja Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin”. Skripsi, Banjarmasin: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, 2019, hal.11
- Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta : Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1997
- Cindy Oeliga Yensi Afita, “Pengaturan Aborsi Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia”, *Rio Law Journal*, Vol .1, No.1, 2020, hal. 5

- Dubelaar, M.J., *Bertroubaar Getuigenbewijs: Totsandkoming En Waardering Van Strafrechlijke Getuigenvenklaringen In Perspectief*, Leiden University, 2014-02-06:1999. Sebagaimana ditulis dalam Disertasi Flora Dianti, *Op.cit.*, hal. 58
- Dyah Permata Asri, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Terhadap Budaya Internasional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Journal of Intellectual Property*, Vol .1, No.1, 2018, hal. 16
- Eka Damayanti dan Aryani Witasari, “Legal Protection from Provocate Abortion Againsts the Child Conceived Because Rape (Case Study on Jurisdiction Ex Residency of Cirebon)”, *Jurnal Hukum Daulat*, Vol .2, No.4, December 2019, hal. 602
- Eko Raharjo, Devi Ramadhanti, & Sanusi Husin, “Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Penyidikan Pelaku Tindak Pidana”, *Journal Peonale*, Vol .6, No.4 2018, hal. 2
- Dewi Meliala, Shisca Evetta, Arini Dwiyantri, Syafira Adlina, Lulu Abriano, & Arivania Nursabilla, “Aborsi Aman” di Indonesia: Masih Jadi Problematik, Yakin Sudah Aman?” <https://fh.unpad.ac.id/aborsi-aman-di-indonesia-masih-jadi-problematik-yakin-sudah-aman/>, diakses pada 8 Oktober 2021
- Frans Sadewo & Sri Sadewo, “Kejadian Keguguran, Kehamilan Tidak Direncanakan, & Pengguguran di Indonesia”, *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol .15, No.2, 2012, hal. 181
- Fikri Aryiad & Ali Mashyar, “Abortion by Rape Victim: A Dilemma in the Drat of Penal Code and Indonesian Health Law”, *Journal of Law and Legal Reform*, Vol .1, No.4, 2020, hal. 633
- Hari Alamri, “Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Lex Privatum*, Vol .5, No.1, 2017, hal. 35
- Hilda Hilmiah Dimiyati, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal ”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol .1, No.2, Desember 2014, hal. 342
- Gulardi HW, *Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2004), hlm 4.
- Isdian Aggraency, “Abortion Due to Rape in The Perspective of Criminal Law and Health Law in Indonesia”, *International Institute of Science, Technology, and Education*, Vol .103, No.6, 2020, hal. 10
- I Rusyadi, “Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana”, *Jurnal Hukum PRIOIRIS*, Vol .5, No.2, 2016, hal. 133

- Irianti Pamasela, et al, "Hasil Visum Et Repertum Korban Perkosaan di RS Bhayangkara Manado Tahun 2012", Jurnal e-Clinic , Vol .3, No.13 September 2015, hal. 806
- Iwan Setiawan, "Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Unigal , Vol .6, No.2, September 2018, hal. 132
- Indana Lazulfa,"Abortion in the Aspect of Criminal Law and Health". Skripsi, Surabaya: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Surabaya, 2018, hal.19
- Johni Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hal. 321.
- Swati Joshi, "Consciousness (with Mutilation) by Anthony Howell. The Odd Volumes of The Fortnightly Review, Les Brouzlis, France, 2019, Paperback.", Sanglap: Journal of Literary and Cultural Inquiry , Vol .7, No.12,2020, hal. 153
- Jendry Kaligis, "Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan", Lex Crimen, Vol .2, No.4, 2013, hal. 24
- Jill Strilling, "Essential Elements of Law of Delict.", Commercial Law in a Global Context , Vol .1, No.12, 2008, hal. 125
- Kadil Sukarna, "Alat Bukti Petunjuk Dalam Proses Peradilan Pidana", Lex Crimen, Vol .2, No.4, 2013, hal. 363
- Keman Fikar Muhammad, "Aspek Hukum tentang Abortus Provocatus Therapeuticus di Indonesia", Jurnal Penelitian Ipteks, Vol .5, No.1, Januari 2020, hal. 139
- Karim Nasution, *Hukum Pembuktian Atas Proses Pidana Jilid I* (Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan Agung, 1976), hal. 22, Sebagaimana ditulis dalam Disertasi Flora Dianti, Op.cit., hal. 185
- Linda Firdawaty, "Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)", Al-'Adalah, Vol .14, No.1, 2017, hal. 111
- Majir Syafi,"Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Kebolehan Aborsi Sebelum 40 Hari Akibat Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam". Skripsi, Kudus: Program Studi Hukum Fakultas Hukum IAIN Kudus, 2018, hal.49
- Muhayati Faridatun, "Aborsi Karena Alasan Cacat Janin, Bagaimana Menurut Hukum Islam?",<https://www.haibunda.com/kehamilan/20191115131118-49-67141/aborsi-karena-alasan-cacat-janin-bagaimana-menurut-hukum-islam>, diakses pada 10 Oktober 2021.

- Moira Stephens, Christopher Jordens, Ian Kerridge, & Rachel Ankenny, "Religious Perspective on Abortian and Secular Response", *J Relig Health*, Vol .49, No.4, July 2009, hal. 516
- Meida Putri Arisinta,"Analisis Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi". Skripsi, Jember: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020, hal.10
- Muhawid, "Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi (Sebuah Upaya Progresif Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)", *Yustisia*, Vol .1, No.62 Agustus 2012, hal. 4
- Nurhasan, "Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana: Kajian", *Commercial Law in a Global Context* , Vol .1, No.12, 2008, hal. 206
- Ni Made Dewi, et al, "Asas Nullus Unus Testis Nullus Testis Dalam Pidana pemerkosaan Anak", *Jurnal Kontruksi Hukum* , Vol .2, No.1, Januari 2021, hal. 195
- Puspitasari, Ni Putu Ratih, I Made Sepud, & I Made Sukaryati Parma, "Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol .2, No.1, 2021, hal. 136
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Putusan Nomor: 105/Pid.B/2021/PN Slk
- Rahman FF, "Analisis Aborsi Dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi". Skripsi: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, 2016, hal. 5
- Remincel, "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana", *Ensiklopedia of Journal* , Vol .1, No.2, January 2019, hal. 268
- Reminceloke, "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang*, Vol .1, No.2, 2019, hal. 271
- Rony Walandouw, et al, "Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP", *Lex Crimen*, Vol .9, No.3, Juli 2020, hal. 252
- Rahmi Yuningsih, "Legalisasi Aborsi Korban Pemerkosaan", *Info Singkat* , Vol .6, No. 16, Agustus 2016, hal. 10
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal 186-187
- Roger Merle & Andre Vitu, *Traite de Droit Criminel-Procedure Penale*, Cinquième edition (Paris: Edition Cujas, 2001), hal. 183. Sebagaimana ditulis dalam Disertasi Flora Dianti, *Op.cit.*, hal. 50

- Siska Elvandari, "Legalization of Abortion Against Victims of Rape Crimes Viewed from Victimology Perspective", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol .50, No.1, 2020, hal. 6
- Terrence Hull & Ninuk Widyantoro, *Abortion in Indonesia: Local Dilemmas, Global Politics*, (New York: Berghahn Book, 2010), hal. 175
- Tri Wijayanto, "Alat Bukti Petunjuk Dalam Proses Peradilan Pidana". Skripsi, Surakarta: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, hal.9
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 595
- Utami Diah Kusumawati, "Tercatat Angka Aborsi Meningkat di Perkotaan". <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029111311-12-8642/tercatat-angka-aborsimeningkat-di-perkotaan/>, diakses pada 8 September 2021.
- Setiyono, "Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana", *Lex Journalica*, Vol .5, No.1, 2007, hal. 33
- Sofia Biloro, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP", *Lex Crimen*, Vol .7, No.1, 2018, hal. 98
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), hlm 1.
- Shendy Kamagi, "Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Lex Crimen*, Vol .8, No.5, Mei 2019, hal. 162
- Wahyu Sasongko, "Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen". Skripsi, Bandar Lampung: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2007, hal.31
- Zuk Piotr & Pawel Zuk, "Woman's Health as an Ideological and Political Issue: Restricting the Right of Abortion, Access to in Vitro Fertilization Procedures and Prenatal Testing in Poland ", *Health Care for Woman International*, Vol .38, No.7, 2017, hal. 691

**Dissertation:**

- Flora Dianti, "Inovasi Sistem Pembuktian Dalam Putusan-Putusan Pengadilan Pidana Indonesia". Disertasi, Jakarta: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2018, hal.48

**Interview:**

Hasil wawancara dengan Lidwina Inge Nurtjahto, pengajar Klinik Hukum Perempuan dan Anak, Fakultas Hukum, Depok, Tanggal 8 November 2021, Pukul 13:00 wib.

